

OMBUDSMAN RI SERAHKAN PIAGAM PENGHARGAAN PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK PEMDA SE-SUMUT

Senin, 25 November 2024 - sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan piagam penghargaan terhadap Pemerintah Daerah yang telah meraih predikat kualitas tertinggi dan kualitas tinggi (zona hijau).

Hal itu berdasarkan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Juni-September 2024

Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, James Marihot Panggabean menyampaikan bahwa acara penyerahan piagam penghargaan penilaian pelayanan publik kepada 34 Pemerintah Daerah Se-Sumatera Utara dihadiri langsung oleh Dadan S. Suharmawijaya selaku Anggota Ombudsman RI, Pj. Gubernur Sumatera Sumatera, Agus Fatoni, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arif Sudarto Trinugroho, Inspektur Provinsi Sumatera Utara, Lasro Marbun, Kepala Dinas, Direktur RS Haji Medan, Kepala Biro Organisasi Pemprovsum serta Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

"Kita patut bersyukur bahwa perhatian Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin baik, hal ini sebagaimana terlihat dari berkurangnya Pemerintah Daerah yang berada di zona kuning bahkan sudah tidak ada lagi Pemerintah Daerah di Sumatera Utara yang berada di zona merah dibandingkan dengan tahun 2023," kata James Marihot Panggabean, Senin (25/11/2024).

Sebagaimana berdasarkan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 terdapat 6 (enam) daerah yang berada di zona kuning yakni Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Pemerintah Kota Sibolga, Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dan Pemerintah Kota Medan.

Namun pada tahun 2024 hanya ada 2 (dua) Pemerintah Daerah yang berada pada kualitas sedang zona kuning yakni Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

"Sebagaimana 6 Pemerintah Kabupaten yang berada di zona kuning pada tahun 2023 mengalami peningkatan nilai misalnya saja Pemerintah Kota Medan yang berada di kualitas sedang zona kuning dan pada hasil penilaian tahun 2024 meraih nilai Kualitas Tertinggi zona hijau demikian halnya Pemerintah Kota Sibolga. Kedua Pemerintah Daerah ini (Pemko Medan dan Pemko Sibolga) mengalami kenaikan hasil penilaian dari kualitas sedang ke kualitas tertinggi," katanya.

Sebagaimana kategori penilaian Ombudsman RI meletakkan 5 kategori yakni zona Merah (kualitas Terendah), zona Merah (kualitas rendah), zona Kuning (kualitas Sedang), zona Hijau (kualitas Tinggi), dan zona Hijau (Kualitas Tertinggi).

Demikian halnya pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada pada ranking 12 dari 34 Pemerintah Provinsi se Indonesia yang menjadi locus penilaian Ombudsman RI.

Hal ini menjadi suatu prestasi baik yang telah dilaksanakan selama ini dalam memperbaiki dan menata penyelenggaraan

pelayanan publik.

James Panggabean menyampaikan bahwa pada Tahun 2024 untuk ranking pertama diraih oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan Pemerintah Daerah yang meraih ranking pertama di Pemerintah Daerah Se Sumatera Utara pada tahun 2023.

Selanjutnya ranking kedua diraih oleh Pemerintah Kabupaten Langkat yang menggeser Pemerintah Kabupaten Simalung sebagai Pemerintah Daerah terbaik kedua pada tahun 2023. Dan pada peringkat ketiga diraih oleh Pemerintah Kabupaten Dairi yang menggeser Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 sebagai Pemerintah Daerah terbaik ketiga.

"Kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas prestasi setiap Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dalam memperbaiki dan membangun inovasi pelayanan publik. Sudah saatnya perbaikan pelayanan publik terus berkelanjutan dapat terbangun pada setiap aparatur untuk pembangunan negara Indonesia yang lebih emas,"pungkasnya.